

**Peran Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dalam Program
Kerja Pengadaan Tanah Kontraktor Kontrak Kerja Sama
PT Medco E&P Palembang**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi

Konsentrasi: Humas



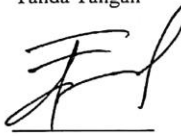

**Diajukan Oleh :
Olivia Rizky
07031381520136**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

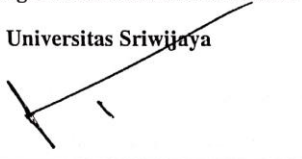
**Peran Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dalam
Pengawasan Kerja Program Pengadaan Tanah Kontraktor Kontrak
Kerja Sama PT Medco E&P Palembang**

Oleh:

Olivia Rizky
07031381520136

Komisi Pembimbing	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si NIP. 198411052008121003		13/11/19
Pembimbing II	Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si NIP. 199208222018031001		13/11/19

Telah dinyatakan memenuhi syarat
pada tanggal 14/11/2019
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Sriwijaya

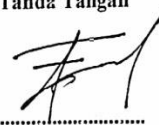




Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PERAN HUMAS SKK MIGAS PERWAKILAN SUMBAGSEL DALAM PROGRAM
KERJA PENGADAAN TANAH KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
PT MEDCO E&P PALEMBANG

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 20 November 2019

Ketua :	Tanggal	Tanda Tangan
1. <u>Faisal Nomaini S.Sos., M.Si</u> NIP. 198411052008121003	27/11-2019	
Anggota:	26/11/2019	
1. <u>Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si</u> NIP. 199208222018031001		
2. <u>Hoirun Nisvak S.Pd., M.Pd</u> NIP. 197803022002122002		
3. <u>Krisna Murti S.I.Kom., MA</u> NIP. 198807252019031010	25 Nov 2019	

Mengetahui, 27/11/19.

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.

NIP. 197905012002121005



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Olivia Rizky
NIM : 07031381520136
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 1 September 1997
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Tesis : Peran Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dalam Pengawasan Kerja Program Pengadaan Tanah Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Medco E&P Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 13 November 2019
Yang membuat pernyataan,



(Olivia Rizky)
NIM 07031381520136

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat membuat skripsi dengan baik untuk melengkapi syarat wajib yang harus ditempuh dalam program studi.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis tentu mendapatkan hambatan dan masalah baik secara teknis dan non-teknis yang dihadapi, namun berkat doa, usaha, serta dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dalam Pengawasan Kerja Program Pengadaan Tanah Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Medco E&P Palembang.”

Penulis menyadari keberhasilan untuk menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya dan saudara/i saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi baik secara moral, material dan spiritual.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Kgs Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya
6. Bapak Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I skripsi saya yang telah sabar membimbing selama pembuatan skripsi.

7. Bapak Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si selaku dosen pembimbing II saya yang telah sabar membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu selama ini.

9. Staf dan karyawan Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu selama penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran oleh pembaca agar menunjang kesempurnaan hasil penelitian selanjutnya di masa akan datang. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan dan ilmu yang penulis miliki.

Palembang, 20 November 2019

Penulis,

Olivia Rizky

NIM. 07031381520136

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : To the world you may be a billionaire, a celebrity, or an icon. But to the angel of death you're just another name on the list.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

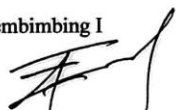
1. Kedua Orang Tuaku.
2. Saudara-saudariku.
3. Diriku.
4. Sahabatku.
5. Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Almamaterku, Universitas Sriwijaya.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dalam program kerja pengadaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil analisis peneliti yang telah didapat dilapangan, dapat disimpulkan hasil yang ditemukan dengan teori Peran Humas oleh Cutlip, Center, Broom dengan 4 elemen yaitu, teknisi komunikasi, expert prescriber, fasilitator komunikasi, dan fasilitator pemecah masalah terdapat peran humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dalam program pengadaan tanah PT Medco E&P Palembang. Hal ini dibuktikan dengan Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel selalu andil dalam kegiatan pengadaan tanah PT Medco E&P Palembang. Serta Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel berperan membantu Medco dalam penyelesaian masalah kegiatan pengadaan tanah yang sedang terjadi.

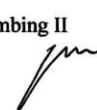
Kata Kunci: Peran Humas, Humas, SKK Migas Perwakilan Sumbagsel, Pengadaan Tanah, PT Medco E&P Palembang.

Pembimbing I



Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si
NIP. 198411052008121003

Pembimbing II



Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom
NIP. 199208222018031001

Mengetahui ^{27/11/15}
Ketua Jurusan



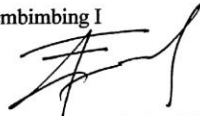
Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 1979050112002121005

ABSTRACT

This study aims to find out the role of the SKK Migas Public Relations Perwakilan South Sumatera in the land acquisition work program. This study uses qualitative research methods using descriptive methods. Based on the results of the analysis of researchers that have been obtained in the field, it can be concluded that the results found with the theory of the Role of Public Relations by Cutlip, Center, Broom with 4 elements, namely, communication technicians, expert prescriber, communication facilitators, and problem solving facilitators, and there is the role of public relations SKK Migas Perwakilan South Sumatera in PT Medco E&P Palembang land acquisition program. This is proven by SKK Migas Public Relations Perwakilan South Sumatera who always contribute to the land acquisition activities of PT Medco E&P Palembang. And the Public Relations SKK Migas Perwakilan South Sumatera played a role in assisting Medco in resolving ongoing land acquisition activities.

Keywords: Role of Public Relations, Public Relations, SKK Migas Perwakilan South Sumatera, Land Procurement, PT Medco E&P Palembang.

Pembimbing I



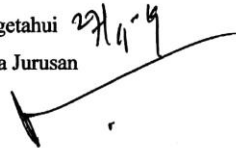
Faisal Nomaini, S.Sos.,M.Si
NIP. 198411052008121003

Pembimbing II



Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom
NIP. 199208222018031001

Mengetahui
Ketua Jurusan



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 1979050112002121005

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	14
-------------------------	----

2.2 Peran Humas SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dalam Program Kerja Pengadaan Tanah Kontraktor Kontrak Kerjasama PT. Medco E&P.....	14
2.2.1 Peran	14
2.2.2 Peran Humas	16
2.3 Berbagai Teori Peran Humas	21
2.3.1 Teori Peran Humas Menurut Cutlip, Center, Broom.....	21
2.3.2 Teori Peran Humas Menurut Rosady Ruslan	22
2.3.3 Teori Peran Humas Menurut Dozier dan Broom.....	22
2.4 Teori Peran Humas yang digunakan dalam penelitian ini	24
2.5 Kerangka Teori	25
2.6 Kerangka Pemikiran	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Definisi Konsep.....	29
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Unit Analisis	33
3.5 Informan	33
3.5.1 Informan Utama	33
3.5.2 Informan Pendukung	34
3.6 Sumber Data	34
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.8 Teknik Analisis Data	35
3.9 Teknik Keabsahan Data	37
3.10 Sistematika Penulisan Skripsi	38

BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI

4.1 Sejarah Instansi	39
4.2 Logo Instansi	46
4.3 Visi dan Misi Instansi.....	47
4.4 Fungsi Instansi.....	48
4.5 Tugas Instansi	48
4.6 Wewenang Instansi	48
4.7 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Sumsel	49
4.8 PT Medco E&P Palembang	50
4.8.1 Visi dan Misi PT Medco E&P	50
4.9 Struktur Organisasi SKK Migas.....	50
4.1.0 Prinsip Kelembagaan.....	57

BAB V Hasil dan Analisis

5.1 Analisis Peran Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dalam Program Kerja Pengadaan Tanah	59
5.1.1 Teknisi Komunikasi.....	60
5.1.2 <i>Expert Prescriber</i>	72
5.1.3 Fasilitator Komunikasi	79
5.1.4 Fasilitator Pemecah Masalah.....	88

BAB VI Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan	105
6.2 Saran	106

Daftar Pustaka	107
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Fokus Pekerjaan Divisi Formalitas.....	5
Tabel 1.2 Daftar Wilayah Proses Pengadaan Tanah Yang belum Terselesaikan.....	8
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	30
Tabel 5.1 Penyampaian Informasi Pihak Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Kepada PT Medco E&P.....	63
Tabel 5.2 Media Monitoring Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel.....	69
Tabel 5.3 Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Sebagai Ahli dalam Kegiatan PT Medco E&P.....	74
Tabel 5.4 Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Sebagai Penasihat Ahli dalam Kegiatan PT Medco E&P.....	77
Tabel 5.5 Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Sebagai Liaison dalam Kegiatan PT Medco E&P.....	81
Tabel 5.6 Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Sebagai Mediator dalam Kegiatan PT Medco E&P.....	86
Tabel 5.7 Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Menganalisis Situasi Masalah PT Medco E&P.....	90
Tabel 5.8 Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Sebagai Problem	

Solver PT Medco E&P.....	94
Tabel 5.9 Hasil Analisis Peran Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dalam Pengawasan Kerja Program Pengadaan Tanah Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Medco E&P.....	
	97

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Sosialisasi di Kecamatan Bayung Lencir.....	10
Gambar 4.1 Sejarah Industri Migas.....	40
Gambar 4.2 Perubahan Regulasi Kegiatan Hulu Migas.....	41
Gambar 4.3 Alamat SKK Migas.....	43
Gambar 4.4 Alamat SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara di Pekanbaru Riau.....	43
Gambar 4.5 Alamat SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan di Palembang, Sumatera Selatan.....	44
Gambar 4.6 Alamat SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Surabaya, Jawa Timur.....	44
Gambar 4.7 Alamat SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi di Balikpapan, Kalimantan Timur.....	45
Gambar 4.8 Alamat SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku di Sorong, Papua Barat.....	45
Gambar 4.9 Logo SKK Migas.....	46
Gambar 4.10 Ukuran dan Komposisi Logo SKK Migas.....	46
Gambar 4.11 Jumlah KKKS di Wilayah Sumsel.....	49
Gambar 4.12 Struktur Organisasi SKK Migas Pusat.....	51

Gambar 4.13 Struktur Organisasi SKK Migas	
Perwakilan Sumbagsel.....	52
Gambar 4.14 Key Performance Indica.....	53
Gambar 5.1 Media Monitoring Humas SKK Migas	
Perwakilan Sumbagsel.....	71
Gambar 5.2 Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Sebagai Liaison dalam Kegiatan PT Medco E&P Palembang.....	83
Gambar 5.3 Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Sebagai Mediator dalam Kegiatan PT Medco E&P Palembang.....	88

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Alur Pengawasan Proses Pengadaan Tanah.....	7
Bagan 2.1 Alur Pemikiran	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Public Relation atau Humas dalam suatu perusahaan saat ini menjadi suatu hal yang penting. Dengan adanya humas di setiap perusahaan, hal itu merupakan usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra serta komunikasi yang baik dan bermanfaat antara perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan seperti masyarakat maupun pihak internal perusahaan itu sendiri. Menurut Cultip, Center, & Broom (2006:5) Humas merupakan fungsi manajemen yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang bisa memberikan dampak positif terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi.

Dalam suatu perusahaan, humas (Hubungan Masyarakat) merupakan profesi yang memegang kendali agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Humas dianggap menjadikan perusahaan menjadi lebih baik karena dalam kinerjanya, ia harus bisa membangun citra perusahaan tersebut agar penilaian orang terhadap perusahaan tersebut positif. Menurut Ruslan (1995:8-9) Humas adalah suatu proses yang kontinyu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari para pelanggannya, konsumen, pegawainya, dan publik umumnya. Kedalam mengadakan perbaikan dan pembenahan melalui membangun budaya perusahaan berbentuk disiplin, memotivasi, meningkatkan pelayanan, dan produktivitas kerja. Sedangkan keluar, berupaya menciptakan kepercayaan dan citra perusahaan yang sekaligus memayungi serta mempertahankan citra produknya.

Agar tercapainya suatu tujuan perusahaan, maka humas juga berperan dalam membantu mencapai suatu tujuan tersebut. Menurut Kozier didalam Gugun (2013:1498), peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Sedangkan Menurut Thoha (2006:10), peran merupakan

sebagai perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Kemudian menurut Rivai didalam Gugun (2013:1498) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam 13 posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi atau kantor sesuai dengan posisi kantor tersebut.

Disebuah perusahaan/instansi Humas memegang peranan penting dalam mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan, baik instansi pemerintahan maupun swasta. Humas pemerintahan terdiri dari Humas pemerintahan pusat maupun Humas pemerintahan daerah. Humas pemerintahan pusat pada departemen-departemen mempunyai dua tugas yakni pertama menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan, dan hasil yang telah dicapai; kedua, menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, tugasnya menasehati pimpinan departemen dalam hubungannya dengan reaksi atau tanggapan public terhadap kebijaksanaan yang dijalankan.

Peran humas sangatlah penting dalam suatu perusahaan. Humas mempunyai fungsi timbal balik, keluar dan ke dalam. Keluar, Humas harus mengusahakan tumbuhnya sikap dan image positif terhadap segala tindakan dan kebijakan organisasi dan lembaga. Ke dalam, Humas berusaha mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan gambaran yang negatif dalam masyarakat dan perusahaan sebelum suatu tindakan atau kebijakan itu dijalankan. Fungsi humas didalam suatu perusahaan antara lain dapat menciptakan dan menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal maupun internal, seperti stakeholder maupun masyarakat umum.

Menurut Rosady Ruslan (2002:22) tahapan-tahapan yang dilakukan seorang humas dalam menjalankan fungsinya meliputi perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, pengawasan, dan evaluasi. Dalam proses evaluasi ialah salah satu bagian dalam humas yang penting. Proses evaluasi penting adanya karena kedua hal tersebut merupakan sebuah langkah akhir sekaligus langkah awal dari sebuah program dalam manajemen humas. Proses monitoring dan evaluasi juga dapat membantu para praktisi humas dalam melihat kemungkinan

buruk yang akan terjadi selama program dari humas yang berlangsung. Pada akhir program pun dilakukan evaluasi secara keseluruhan dan hasil evaluasi inilah yang digunakan sebagai informasi utama dalam menuntukan rencana program selanjutnya. Proses pengawasan dan evaluasi sebagai bagian dalam humas merupakan hal yang penting. Proses evaluasi penting karena dalam proses humas tahap-tahap yang harus dilakukan selalu berputar dan proses evaluasi ini merupakan sebuah tahapan humas yang tidak dapat dilewatkan bila seorang praktisi menginginkan program selanjutnya lebih baik dari program sebelumnya.

Hampir semua perusahaan khususnya perusahaan yang berorientasi pada profit akan memperhitungkan dengan matang keputusan yang akan diambil. Begitu pula dalam membuat keputusan berdasarkan program manajemen humas. Karena hal tersebut dibutuhkan pengawasan serta evaluasi dalam setiap program. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas contohnya, perusahaan tersebut membutuhkan proses pengawasan serta evaluasi dalam setiap program yang akan mereka lakukan. Contohnya seperti SKK Migas Perwakilan Sumbagsel.

SKK Migas merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, SKK Migas memiliki lima wewenang yaitu, membina kerjasama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional KKKS, merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja KKKS, mengawasi kegiatan utama operasional KKKS, membina seluruh Aset KKKS yang terjadi milik negara, melakukan koordinasi dengan pihak dan atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu.

Dalam tugasnya, SKK Migas berfungsi untuk menjalin kontrak kerja sama bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) merupakan pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Kontrak Kerja Sama merupakan Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam UU No 22/2001 adalah paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan selanjutnya Kontraktor dapat mengajukan perpanjangan lagi paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kontrak Kerja Sama terdiri dari jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi. Jangka waktu Eksplorasi dilaksanakan selama 6 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali periode paling lama 4 tahun. Setelah kontrak kerja sama terjalin, maka segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh KKKS akan diawasi oleh SKK Migas langsung dan selanjutnya pihak SKK Migas akan melaporkan pada menteri ESDM.

Kegiatan yang akan dilakukan setelah kontrak kerja sama terjalin yaitu kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang berintikan pada kegiatan usaha eksplorasi serta eksploitasi minyak yang ada di Indonesia. Eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi dalam rangka menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan eksploitasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau memproduksi minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan. Kegiatan tersebut terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukung. Inti dari kontrak kerja sama tersebut terjalin ialah untuk mendapatkan minyak bumi yang nantinya akan di berikan kepada negara agar dapat di manfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat di Indonesia. Dalam proses eksplorasi yang akan dilakukan oleh KKKS PT Medco E&P Palembang, salah satu proses dari eksplorasi tersebut ialah pengadaan tanah.

Pengadaan tanah merupakan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah,

bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah dapat dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah.

Program pengadaan tanah merupakan salah satu hal yang dikerjakan oleh Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel. Pada Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel terbagi lagi menjadi dua divisi, yaitu Divisi Program dan Komunikasi serta Divisi Formalitas. Tidak berbeda dari kebanyakan Humas pada instansi lainnya, Divisi Program dan Komunikasi memiliki fungsi dalam hal menangani pihak media. Tapi tidak seperti Humas pada instansi kebanyakan, Divisi Formalitas memiliki fungsi yang berbeda dari Humas lainnya.

Pada Divisi Formalitas ada empat fokus yang mereka kerjakan, yaitu:

Tabel 1.1
Fokus Pekerjaan Divisi Formalitas

NO	Fokus Pekerjaan Divisi Formalitas	Keterangan
1	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Coffee Morning - Stakeholder Meeting - Safari Ramadhan - Kunjungan Kehormatan - Silaturahmi - Koordinasi Rencana Kegiatan
2	Tanggung Jawab Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop - Monitoring - Laporan Realisasi Perencanaan Program - Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten - Penguatan Mitra Binaan KKKS
3	Perizinan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan Kegiatan - Izin Mob/Demob - Rekomendasi RT/RW - Rekomendasi IPPKH - IMB - Izin Operasi dan

		Layak Operasi - Izin Penggunaan ABT & APT
4	Pengadaan Tanah	- Mekanisme Pengadaan Tanah Skala Kecil - Monitoring Pengadaan Tanah - Pengurusan Rekomendasi IPPKH untuk Kegiatan dalam Kawasan Hutan - IP BMN Tanah - Koordinasi proses Sertifikasi BMN Tanah - Sosialisasi Rencana Kegiatan Pengadaan Tanah

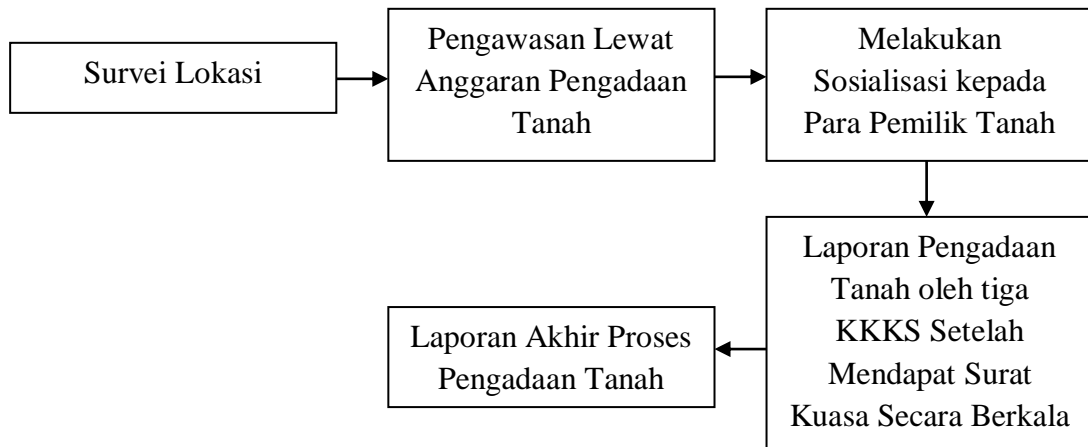
Sumber: Internal Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa salah satu fungsi dari Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel ialah mengurus mengenai program pengadaan tanah yang dikerjakan KKKS. Biasanya Humas SKK Migas akan menjadi penghubung antara KKKS dan masyarakat dalam hal penyelesaian kesepakatan pembebasan lahan yang dimiliki warga guna berjalannya program pengadaan tanah.

Dalam program pengadaan tanah Humas SKK Migas mengawasi setiap alur pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh KKKS akan lebih terkontrol.

Bagan 1.2

Alur Pengawasan Proses Pengadaan Tanah



Sumber : Internal Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel

Dalam proses pengawasan program kerja pengadaan tanah, pada proses sosialisasi terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh pihak Humas SKKMigas Perwakilan Sumbagsel, yaitu:

- A. Konflik di dua wilayah yang belum terselesaikan
- B. Tingkat partisipasi warga rendah dalam pengadaan tanah
- C. Sosialisasi tidak berjalan dengan baik

Adapun penjelasan masing-masing poin diatas ialah sebagai berikut:

A. Konflik di Dua Wilayah yang Belum Terselesaikan

Pada dua wilayah, proses pengadaan tanah sampai sekarang belum menemui titik terang dalam kesepakatan pembebasan lahan. Dua wilayah tersebut berada di Kabupaten Musi Rawas dan di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Way Pengabuan.

Tabel 1.2
Daftar Wilayah Proses Pengadaan Tanah yang Belum terselesaikan

NO	Wilayah Pengadaan Tanah	KKKS	Tahun Proses Pengadaan Tanah
1.	Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Way Pengabuan	Harpindo Mitra Kharisma	2018 - Sekarang
2.	Kabupaten Musi Rawas	PT Medco E&P Palembang	2018 - Sekarang

Sumber : Internal Humas SKKMigas Perwakilan Sumbagsel

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat daftar wilayah proses pengadaan tanah yang belum terselesaikan. Kabupaten Lampung Tengah, warga dan pihak SKK Migas Serta Harpindo Mitra Kharisma belum bisa mencapai kesepakatan dengan harga yang ditentukan oleh pihak KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Warga menolak karena menganggap bahwa harga yang telah ditentukan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) rendah dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Pengadaan tanah di Kabupaten Lampung Tengah merupakan proses pengadaan tanah skala kecil dengan luas tanah yang akan dibebaskan tidak lebih dari 5 Ha. Namun, sampai saat ini belum mencapai kesepakatan, maka proses pembebasan tanah ini dialihkan ke proses pengadaan tanah skala besar. Untuk perbedaan antara skala besar dan skala kecil itu ialah jika proses skala kecil dapat dilakukan dengan proses pengadaan tanahnya menurut Peraturan Pemerintah No.71, sedangkan proses skala besar merupakan proses pengadaan tanah yang melewati tim dari Pemerintah Daerah dan BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Proses pengadaan tanah di wilayah Lampung Tengah, sudah memasuki proses penerapan Lokasi. Penerapan lokasi merupakan salah satu proses pengadaan tanah dari skala besar. Penerapan lokasi dilakukan pada saat melakukan pengadaan tanah diatas 5 Ha. Proses dimulai dengan menyampaikan dokumen rencana pengadaan tanah kepada Pemerintah Daerah (Pemda), kemudian Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan pemeriksaan kembali atas dokumen tersebut. Setelah itu ditetapkan lokasi serta dibentuk tim untuk pembebasan tanah oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Di wilayah Kabupaten Musi Rawas konflik yang dihadapi sama seperti pada wilayah Lampung Tengah. Masyarakat tidak menyetujui dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak KJPP. Menurut mereka harga yang diajukan sangatlah rendah dengan apa yang mereka harapkan. Pada proses pengadaan tanah ini, ialah termasuk proses pengadaan tanah skala besar yang dimana besar tanah yang akan dibebaskan itu lebih dari 5 Ha. Pada saat ini dikarenakan pihak warga serta pihak Medco dan SKK Migas belum mencapai kesepakatan, maka dari itu proses saat ini pada tahap konsinyasi ke pengadilan.

Pada Proses pengadaan tanah skala besar itu sendiri dimulai dari penyampaian dokumen, kemudian penetapan lokasi, setelah itu sosialisasi, lalu berlanjut pada tahap penyampaian harga dan negosiasi, apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan di konsinyasi di pengadilan. Saat ini pihak SKKMigas dan pihak KKKS masih berusaha untuk membebaskan kedua tanah di kedua wilayah tersebut. Prosesnya akan berlanjut sampai tanah tersebut dibebaskan oleh pihak warga setempat.

Dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT Medco E&P Palembang di Kabupaten Musi Rawas tidak hanya terkendala pada proses negosiasi pada warga saja, melainkan pada pihak PT Medco E&P sendiri tidak memiliki inisiatif tersendiri untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dari hasil pra survey penulis dengan pihak Humas SKK Migas sendiri menemukan bahwa Pihak Medco E&P Palembang selalu bergantung kepada SKK Migas. Dalam penyelesaian masalah pihak PT Medco E&P Palembang tidak mandiri dalam pemecahan masalah yang sedang mereka hadapi, mereka akan bergantung pada SKK Migas untuk selalu memberikan solusi akan masalah yang sedang terjadi. **(Sumber: Wawancara dengan pihak Humas SKK Migas pada Maret 2019)**

B. Tingkat Partisipasi Warga Rendah dalam Pengadaan Tanah

Partisipasi warga dalam progam kerja pengadaan tanah sangat dibutuhkan. Dalam pengadaan tanah, SKK Migas dan KKKS membutuhkan lahan untuk proses pencarian minyak dan gas bumi. Lahan yang akan dijadikan sebagai tempat pencarian minyak dan gas bumi merupakan lahan yang harus dibebaskan terlebih

dahulu kepemilikannya. Dalam hal ini, partisipasi dari warga sangat dibutuhkan. Karena pihak SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dan KKKS belum bisa mencapai kesepakatan dengan warga dalam hal pembebasan lahan, maka sering terjadinya ketidakperdulian warga terhadap kegiatan tersebut. Contohnya seperti proses sosialisai yang dilakukan di Kecamatan Bayung Lencir. Pada saat sosialisasi tersebut warga tidak turut hadir dalam sosialisasi yang dilakukan.

Gambar 1.1
Sosialisasi di Kecamatan Bayung Lencir



Berdasarkan gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa sosialisasi pengadaan tanah yang berlangsung di Kecamatan Bayung Lencir tidak dapat dilakukan dikarenakan warga yang diundang untuk mengikuti sosialisasi tersebut tidak hadir. Karena hal itu, mau tidak mau pihak SKK Migas dan KKKS membatalkan sosialisasi tersebut dan menjadwalkan ulang waktu sosialisasi tersebut.

Satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah adalah adanya keterlibatan warga secara aktif. Mengingat keberhasilan program pengadaan tanah ini sangat ditentukan oleh pembebasan lahan yang dimiliki warga, maka proses negosiasi pihak SKKMigas dan KKKS kepada warga sangatlah penting. SKKMigas dan KKKS tentunya harus memiliki strategi tersendiri agar kesepakatan yang akan dilakukan bersama para warga dapat berhasil.

Pihak SKKMigas Perwakilan Sumbagsel tentunya harus dapat memberikan solusi yang bisa digunakan oleh KKKS dalam mempengaruhi atau merubah pikiran warga agar terus berpartisipasi dengan aktif pada kegiatan pengadaan tanah. Pihak SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dan KKKS tentunya dapat berkomunikasi dengan baik kepada para warga sampai bisa mendapatkan kepercayaan warga mengenai pengadaan tanah sehingga dapat memengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya memengaruhi perilaku dan tindakan mereka terhadap pengadaan tanah. Dan dapat mengubah pengetahuan warga mengenai fungsi pengadaan tanah dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan mereka sendiri nantinya.

Dalam peran SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dalam pengawasan kerja KKKS, dalam hal ini SKKMigas membutuhkan kemampuan dalam komunikasi persuasif sehingga nantinya akan berguna dalam membantu KKKS untuk meyakinkan warga agar berbuat atau bertingkah laku seperti yang diharapkan dengan cara membujuk tanpa paksaan dan tanpa kekerasan.

C. Sosialisasi Tidak Berjalan dengan Baik

Program pengadaan tanah membutuhkan proses sosialisasi kepada warga yang belum mengetahui dengan terperinci kegiatan seperti apakah pengadaan tanah tersebut. Pada Proses sosialisasi ini menjadikan komunikasi sangat berkontribusi. Informasi mengenai pengadaan tanah yang bisa menjadi sumber klarifikasi atau sumber pengetahuan baru bisa membuat warga menjadi lebih paham mengenai suatu permasalahan. Selain itu dengan adanya komunikasi diantara warga dengan pihak SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dengan KKKS bisa saling terhubung satu sama lain serta bisa saling berinteraksi. Interaksi inilah yang kemudian bisa disebut sebagai proses sosialisasi. Komunikasi akan sangat membantu mewujudkan proses sosialisasi yang baik apabila proses interaksi sosial di dalamnya juga terjadi dengan lancar.

Dari data yang di dapat oleh penulis, dilihat sosialisasi yang dilakukan oleh pihak SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dan KKKS sering kali tidak berjalan dengan baik dikarenakan permasalahan seperti kurangnya kesepakatan

antara penilaian tanah dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang jauh dibawah harapan pemilik tanah sehingga hal itu membuat proses sosialisasi tersebut menjadi terhambat. Contohnya pada sosialisasi yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Asset 2, dalam sosialisasi yang dilakukan PT Pertamina EP Asset 2 ini memiliki beberapa kendala. Oleh karena itu proses sosialisasi tidak dapat hanya dilakukan satu kali melainkan beberapa kali sehingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Permasalahan yang terjadi tidak hanya itu saja, melainkan tentang masalah surat kepemilikan tanah. Hal ini dikarenakan pemilik belum memiliki surat atas namanya sehingga dibutuhkan waktu untuk merubah surat tanah menjadi nama si pemilik.

Dengan permasalahan yang terjadi pada proses sosialisasi pengadaan tanah membuat proses pencarian minyak dan gas menjadi terhambat dikarenakan terlalu lamanya pihak SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dan KKKS mencapai kesepakatan dengan pihak warga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan mengambil judul “Peran Humas SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dalam Pengawasan Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Medco E&P Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana peran Humas SKKMigas perwakilan Sumbagsel dalam Program Kerja Pengadaan Tanah Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Medco E&P Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran Humas SKKMigas perwakilan Sumbagsel dalam Program Kerja Pengadaan Tanah Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Medco E&P Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi orang-orang yang membacanya. Selain itu penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk perkembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang kehumasan. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan konsep dan teori-teori yang ada dan pembaca juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah mereka miliki.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pihak SKKMigas Palembang dalam hal kehumasan. Serta penelitian ini juga dapat menggambarkan bagaimana Peran Humas SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dalam Pengawasan Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Medco E&P Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Elvinaro. *Handbook of Public Relations*.

Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Baskin, O., Aronoff, C & Lattimore, D. (1997). *Public Relations: The Profession and The Practice, Ed 4*

Madison, WI: Brown & Branchmark

Bohari. *Pengawasan Keuangan Negara*. 2000

Jakarta : Rajawali.

Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*.

Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Cutlip, Scott. M., Center Allen H. & Broom, Glen. M. 2006 . *Effective Humas, Ed. 9*.

Jakarta: Kencana.

Comcowich, William J. (Bill). 2010, *Media Monitoring the Complete Guide: Everything you Wanted to Know About Media Monitoring, But Didn't Think to Ask*,

CyberAlert.Inc.

Deddy Mulyana dan Solatun. 2008. *Metode Penelitian Komunikasi*.

Bandung. PT Remaja Rosdakarya

Effendy, O. U. (1999). *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis*

Bandung: Remaja Rosdakarya

Onong Uchjana Effendy. (1993). *Human Relations dan Public Relations*.

Bandung: Mandar Maju.

Ruslan, R. (2002). *Manajemen Humas & Komunikasi : Konsepsi & Aplikasi*. Edisi Revisi.

Jakarta: Raja Grafindo Persada

S. K, Bonar. (1993). *Hubungan Masyarakat Modern : Public Relations*.

Jakarta : Rineka Cipta

Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/137221-ID-none.pdf>

(di akses tanggal 22 Desember 2018)

<https://media.neliti.com/media/publications/93893-ID-peranan-humas-dalam-pelaksanaan-monitori.pdf>

(di akses tanggal 25 Desember 2018)

Jurnal

Oktavianingsih, Tika. 2012 Peran Humas Lembaga Negara dalam Menjaga Reputasi Organisasi (Studi Pada Peran Humas DPR RI dalam Menjaga Reputasi Kinerja Anggota DPR RI)

Rahayu, Dwi Ira. 2014 Peran Humas Dalam Rangka Meningkatkan Citra

Sekolah di SMK YPKK 3 Sleman Yogyakarta

Rachman, Siam Riezky. 2018 Peran Humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dalam Mempromosikan Wisata Situ Cipondoh di Era New Media (Studi Kasus Pengelolaan Website, Instagram, dan Tangerang TV)